

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kartono. *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sinaga, Syamsudin. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Universitas Pelita Harapan, Fakultas Hukum. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan*. Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2019.
- Widjajati, Erna. *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Jalur, 2014.

JURNAL/TESIS

- Afriana, Anita, and Rai Mantili,. “Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia.” *hukum De'jure* 2, no. 2 (2017). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1301>.
- Aprita, Serlika. “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit.” *Samudra keadilan* 4, no. 1 (2019). <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1178>.
- Marina, Caroline, and Harjono. “Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam

- Perkara Perdata.” *Verstek* 8, no. 1 (2020).
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39609/26040>.
- Muryati, Dewi Tuti, Rini Heryanti, and Dharu Triasih. “Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas.” *Dinamika Sosbud* 17, no. 2 (2015).
https://www.researchgate.net/publication/329536655_KAJIAN_NORMATIF_ATAS_KEPAILITAN_BUMN_PERSERO_DALAM_KAITANNYA_DENGAN_PENGATURAN_PERSEROAN_TERBATAS.
- Nadhiro, Anis Nur. “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Hak Pekerja.” *Notarie* 2, no. 3 (2019). <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/16237/pdf>.
- Nola, Luthvi Febryka. “Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya.” *Negara Hukum* 9, no. 2 (2018).
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1047>.
- Putra, Alif Kurnia. “Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven.” *Jurist Diction* 2, no. 4 (2019).
<http://repository.unair.ac.id/79781/>.
- Ratna, Ikhwani, and Marwati. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Yang Desleting Dari Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016.” *Tabarru: Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018). <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/2044>.
- Safitri, Nurul Alfaruni, Rahadi Wasi Bintoro, and Sanyoto. “Upaya Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan Tentang Pembatalan Homologasi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019).” *Soedirman Law Review* 2, no. 2 (2020). <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/51>.
- Sari, Dinda Agita, and Evli Zahara. “Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Formil Dan Materil UU No 37 Tahun 2004 Terhadap Perkara Kepailitan Pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga Medan.” *Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2019).
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1955/1848>.
- Sularto. “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan.” *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012).
<https://www.neliti.com/publications/40583/perlindungan-hukum-kreditur-separatis-dalam-kepailitan>.
- Supriyadi. “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan.” *Lentera Pustaka* 2, no. 2 (2016).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka/article/view/13476>.
- Tampemawa, Stevi. “Prosedur Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajib.” *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019).

Yahya, Alvin. "Disharmonisasi Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Hutang Dengan Hak Preferen." *Repertorium* 1, no. 1 (2014). <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/334536>.

Yohana. "Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum." *Mercatoria* 8, no. 1 (2015). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/646>.

Yusuf, Inayah. "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pailit Terhadap BUMN (Studi Kasus PT. Dirgantara Indonesia (Persero))." Universitas Indonesia, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/ Pdt.Sus/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pailit/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 28 Maret 2019.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. tanggal 18 Mei 2015.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby tanggal 17 September 2018.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 4 September 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, 1995.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, 2003.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007.

MAJALAH

Iskandar, Lisman. "Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Yuridika*, 1997.

POWER POINT

Hiariej, Eddy O.S. 2020. Perkembangan Asas Lex Specialist. Disajikan dalam *Diskusi Hukum Pidana Nasional*.

WAWANCARA

Sihombing, Johannes. “Pengaturan Kepailitan Terhadap BUMN”. Hasil wawancara pribadi: 29 Desember 2020, Zoom Meeting.

WEBSITE

Dwinanto, Rizky. “Persoalan Eksekusi Aset BUMN Yang Dinyatakan Pailit.” *Hukumonline*. Last modified 2019. Accessed November 30, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dcba4a888cf5/persoalan-eksekusi-aset-bumn-yang-dinyatakan-pailit/>.

